

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum atau pemilu menjadi salah satu indikator dari keberhasilan sebuah negara demokrasi. Dikebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari tingkat partisipasi politik masyarakat. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.<sup>1</sup> Di Indonesia memiliki dua bentuk pemilihan yaitu pemilihan umum legislatif ditingkat pusat maupun daerah, dan pemilihan umum eksekutif untuk Presiden dan kepala daerah.

Pemilihan Kepala Daerah yang lebih dikenal Pilkada menjadi konsensus politik nasional yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Indonesia telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, Pilkada langsung merupakan sebuah terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi ditingkat lokal.<sup>2</sup> Pilkada ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta menunjukkan demokrasi

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 461.

<sup>2</sup> Bakti Saputra, Skripsi : *“Kekalahan Tobroni Harun-Komarunizar dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung 2015”* (Bandar Lampung : Universitas Lampung, FISIP, 2016), Hal 2.

terletak ditangan rakyat, sehingga rakyat dapat menentukan wakilnya yang akan mengatur jalannya pemerintahan di tingkat lokal. Dengan adanya pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat, pemerintah ditingkat lokal diharapkan semakin dekat dengan masyarakat yang akan berimbas pada terciptanya rasa saling percaya dan respon yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah. Jika hubungan antara masyarakat dengan pemerintah telah terjalin dengan baik maka dalam penerapan kebijakan akan lebih mudah.

Pada pemilihan umum pemberian suara merupakan mandat yang diberikan rakyat kepada pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin yang terpilih akan mendapatkan legitimasi (keabsahan) dari rakyat, oleh karena itu setidaknya ada tiga alasan pentingnya dilakukan Pilkada secara langsung oleh rakyat. *Pertama*, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah, sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. *Kedua*, melalui Pemilihan kepala daerah (Pilkada) diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada visi, misi dan program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. *Ketiga*, Pilkada merupakan sarana pertanggung jawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang.<sup>3</sup> Sejalan dengan hal tersebut dilihat dari salah satu tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Janedjri M Gaffar, “Politik Hukum Pemilu”. ( Jakarta : Konpress, 2012), hlm. 86

“Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>4</sup>

Selanjutnya terjadi beberapa kali perubahan peraturan dan perundang-undangan tentang pemerintah daerah ini, terakhir adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.<sup>5</sup> Bentuk tindak lanjut dari pemberlakuan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah tersebut, maka diselenggarakan Pilkada secara langsung. Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2005 di Kutai Kertanegara. Pada tahun 2005 telah berlangsung Pilkada di 207 Kabupaten/Kota dan 7 Provinsi. Tahun 2007 berlangsung Pilkada di 35 Kabupaten/Kota dan 6 Provinsi. Tahun 2008 dilaksanakan 160 Pilkada di 13 Provinsi dan 147 Kabupaten/Kota.<sup>6</sup>

Sumatera Barat (Sumbar) sebagai salah satu daerah di Indonesia, hingga hari ini telah melakukan pemilihan kepala daerah berupa gubernur secara

---

<sup>4</sup> Suharizal, *Pemilukada (Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang)*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016), hal 3.

<sup>5</sup> Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), (<http://www.perludem.org/2017/11/30/undang-undang-tentang-pemilihan-kepala-daerah-pilkada/>, diakses tanggal 31 Juli 2019.)

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal 4.

langsung sebanyak 3 kali, Pilkada langsung pertama dilaksanakan pertengahan tahun 2005, lalu tahun 2010 dan terakhir pada tahun 2015. Pilkada langsung pertama dilakukan dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diikuti oleh lima pasang calon untuk memimpin Sumbar periode 2005-2010. Pada Pilkada pertama ini posisi Gubernur dan Wakil Gubernur dimenangkan oleh pasangan Gumawan Fauzi dengan Wakilnya Marlis Rahman. Berikut adalah nama kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2005<sup>7</sup>.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2005**

No	Nama Calon	Partai
1.	Gumawan Fauzi - Marlis Rahman	PDIP dan PBB
2.	Leonardy Harmainy-Rusdi Lubis (Partai Golkar)	Golkar
3.	Kapitra Ampera-Dalimi Abdullah	(PPP dan Partai Demokrat)
4.	Irwan Prayitno-Ikasuma Hamid	PKS
5.	Jeffrie Geovanie-Dasman Lanin	Koalisi Sakato (PAN)

*Sumber: Detik news.2006*

Tahun 2010 pemilihan Kepala Daerah Sumbar kembali dilangsungkan, Pilkada kali ini diikuti oleh lima pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berbagai partai pengusung. Calon yang menang akan memimpin Sumbar selama periode 2010-2015. Hasil dari pilada tahun ini dimenangkan oleh pasangan Irwan Prayitno-Muslim Kasim mengalahkan empat pasang calon lainnya dengan perolehan suara 32,44% dari total suara sah. Sementara pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur petahana Marlis Rahman-Aristo Munandar berada pada posisi kedua dengan perolehan suara 26,22% dari total

<sup>7</sup> Detiknews, "Lima Pasangan Cagub Sumbar Umbar Janji Yang Sama" (<https://news.detik.com/berita/379174/lima-pasangan-cagub-Sumbar-umbar-janji-yang-sama>, diakses pada 30 Juli 2019)

suara sah, Endang Irzal-Asrul Syukur di peringkat ketiga dengan perolehan suara 20,54% dari total suara sah.

Adapun calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang ikut dalam kontestasi politik pada Pilkada tersebut adalah sebagai berikut<sup>8</sup> :

**Tabel 1.2**  
**Daftar Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2010**

No	Nama Calon	Partai
1.	Irwan Prayitno-Muslim Kasim	PKS-HANURA-PBR
2.	Marlis Rahman-Aristo Munandar	Golkar
3.	Fauzi Bahar-Yohanes Dahlan	PAN dan PPP
4.	Endang Irzal-Asrul Syukur	Demokrat-Gerindra
5.	Ediwarman-Husni Hadi	Koalisi Partai Maju Bersama, 24 partai

Sumber : *kompas.com*

Gejolak politik makin memanas pada Pilkada yang ketiga kalinya, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang dilangsungkan tahun 2015, pasalnya pada tahun ini yang ikut bersaing adalah dua orang calon yang pernah menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah periode sebelumnya. Pada tahun ini petahana Irwan Prayitno kembali mencalonkan diri bersama pasangan baru yaitu Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit, yang di dukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra yang telah mendapatkan 13 kursi di DPRD Sumbar. Tidak ketinggalan dengan *incumbent* Muslim Kasim yang merupakan Wakil Gubernur pada periode sebelumnya juga ikut mencalonkan diri dengan menggandeng mantan Walikota Padang dua periode sebelumnya yaitu Fauzi Bahar (MK-FB), mereka maju dengan diusung oleh empat partai koalisi yaitu NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), PDI-Perjuangan, dan Hanura.

<sup>8</sup> Erlangga Djumena “Perolehan suara Pilkada Sumbar ditetapkan” (<https://regional.kompas.com/read/2010/07/12/1956358/perolehan.suara.Pilkada.Sumbar.ditetapkan>, diakses pada 30 Juli 2019)

Hingga total kursi yang dimiliki sebanyak 23 di DPRD Sumatera Barat.<sup>9</sup> Pilkada tahun 2015 ini dimenangkan oleh pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit dengan perolehan suara 1.175.858 suara atau 58,62% dari jumlah suara yang masuk. Sementara Muslim Kasim-Fauzi Bahar hanya memperoleh 830.131 suara atau 41,38% dari total suara masuk.<sup>10</sup> Irwan Prayitno kembali dinobatkan sebagai Gubernur Sumbar dengan wakil Nasrul Abit kepemimpinan periode 2016-2021.

**Tabel 1.3**  
**Perolehan Suara Pilkada Sumbar Tahun 2015**

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung	Persentase
1.	Irwan Prayitno-Nasrul Abit	PKS dan Gerindra	58,62%
2.	Muslim Kasim-Fauzi Bahar	NasDem, PAN, PDI-P dan Hanura	41,38%

Sumber : Data Primer tahun 2019

Pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung beberapa kali tersebut pada dasarnya adalah pemilihan kekuasaan eksekutif untuk pergantian pemimpin. Pelaksanaan pemilihan umum yang banyak menyita biaya, tenaga, dan perhatian rakyat telah menghasilkan suatu evaluasi dan persepsi tersendiri ditengah masyarakat. Persepsi ini nantinya yang akan mempengaruhi perilaku politik seseorang. Secara etimologi persepsi berasal dari Bahasa Inggris “*perception*” yang artinya persepsi, penglihatan, tanggapan; yaitu proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungan melalui indera-indera yang dimilikinya atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data

<sup>9</sup> Umi Nur Fadhilah dan Muhammad Hafil, “*Wakil Gubernur Sumbar Maju Dalam Pilkada 2015*”, (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/Pilkada/15/07/28/ns79bx326wakilgubernur-Sumbar-maju-dalam-Pilkada-2015>, diakses pada 30 Juli 2019)

<sup>10</sup> Muslim AR, “*Hasil Rekapitulasi KPUD Irwan Nasrul Menang DiPilkada Sumbar*”, (<https://www.liputan6.com/Pilkada/read/2394176/hasil-rekapitulasi-kpud-irwan-nasrul-menang-di-Pilkada-Sumbar>, diakses pada 30 Juli 2019)

indera<sup>11</sup>. Persepsi merupakan suatu proses yang diawali oleh penginderaan yang akan menghasilkan sebuah citra atau *image*<sup>12</sup>. Pada proses penginderaan terjadi perekaman fenomena yang akan menjadi sebuah analisis pada diri seseorang sebagai proses belajar yang menghasilkan komponen kognitif, proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang juga akan menjadi komponen-komponen persepsi.

Selain persepsi politik masyarakat, dinamika pemilu juga dipengaruhi oleh perilaku politik dari pemilih itu sendiri. Tidak dapat dinafikan bahwa perilaku memilih seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Lingkungan dapat membentuk struktur kognisi dan afeksi politik pemilih yang di ekspresikan dalam bentuk tindakan, oleh karenanya dengan memahami karakteristik lingkungan sosial dimana individu berinteraksi, maka akan dapat pula memahami kecenderungan respon politik yang akan diberikan seseorang.<sup>13</sup> Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat persepsi dan pilihan politik masyarakat Sumatera Barat khususnya Kota Padang pada pemilihan Gubernur tahun 2020.

Perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat secara umum dan bukan tujuan perorangan. Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan

---

<sup>11</sup> Sarbaini, Harpani Matnuh, Zainal, Mei 2020. Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik Di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 5, (9), Universitas Lambung Mangkurat. Hlm. 737

<sup>12</sup> Elena shestopal, qualitative and quantitative methods in political perception studies.. kajian yang dipresentasikan dalam ECPR general conference, glasgow (september 2-6.2014) lomonosov moscow state university, departement of political sciencince. Hlm. 115-131

<sup>13</sup> Yoserizal dan Asrinaldi A. "Preferensi dan Rasionalisasi Pilihan Politik Perempuan Minang Perkotaan di Kota Padang terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilihan Umum". (Demokrasi, Vol. VIII No.2 Tahun 2009 FISIP, Universitas Andalas),Hal. 187

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang berkaitan dengan sikap politik, yaitu kesiapan untuk bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut.<sup>14</sup> Keberagaman persepsi yang terbentuk dalam masyarakat dan kecendrungan perilaku politik yang ditampilkan oleh masyarakat pada saat pemilu dapat dilihat melalui beberapa pendekatan yaitu *pertama*, pendekatan sosiologis yang lebih menekankan pada kesamaan latarbelakang pemilih dengan calon, latar belakang yang dimaksud berupa latarbelakang demografi atau kedaerahan, sosial ekonomi, agama dan pendidikan.<sup>15</sup>

*Kedua*, Pendekatan psikologis yang lebih menekankan pada pemilih mempunyai perasaan dekat dengan partai tertentu sikap mendukung partai tertentu dan pemilih mempunyai informasi yang cukup tentang identitas kepartaian untuk menentukan pilihan dalam hal ini juga termasuk akses masyarakat terhadap media, baik media massa maupun media sosial.<sup>16</sup> karena dizaman sekarang semakin sering akses seseorang terhadap media maka semakin banyak informasi yang didapat. *Ketiga* adalah pendekatan pilihan rasional dimana pemilih dalam menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan untung rugi yang bisa diperoleh atau rasionalitas sipemilih.<sup>17</sup> Dan *terakhir* adalah melalui pendekatan politik uang, dimana kecendrungan perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh besar kecilnya uang atau nilai barang yang didapatkan.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Sudijono Sastroatmodjo, "Perilaku Politik", Semarang: IKIP Press, 1995, hal. 4.

<sup>15</sup> Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 1999), hal.72.

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal.25.

<sup>17</sup> *Ibid.*,hal 25.

<sup>18</sup> Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (ed), *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientalisme di Pemilu Legislatif 2014* (Yogyakarta : Polgov, 2015), hlm. 24.



Berdasarkan pendekatan diatas menurut hasil penelitian Affan Gaffar (1992), J.Kristiadi (1996), Suryanef dan Al Rafni (2001), serta William Liddle dan Saiful Mujani (2006) tentang perilaku memilih pada pemilihan umum, menunjukkan adanya pengaruh pendekatan psikologis yaitu identifikasi kepartaian terhadap perilaku memilih pada pemilihan umum di Indonesia. Selain itu, menurut Affan Gaffar (1992) pemimpin formal dan pemimpin informal berpengaruh terhadap perilaku memilih. Hasil penelitian William Liddle dan Saiful Mujani (2006) juga menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku memilih adalah kepemimpinan partai.<sup>19</sup>

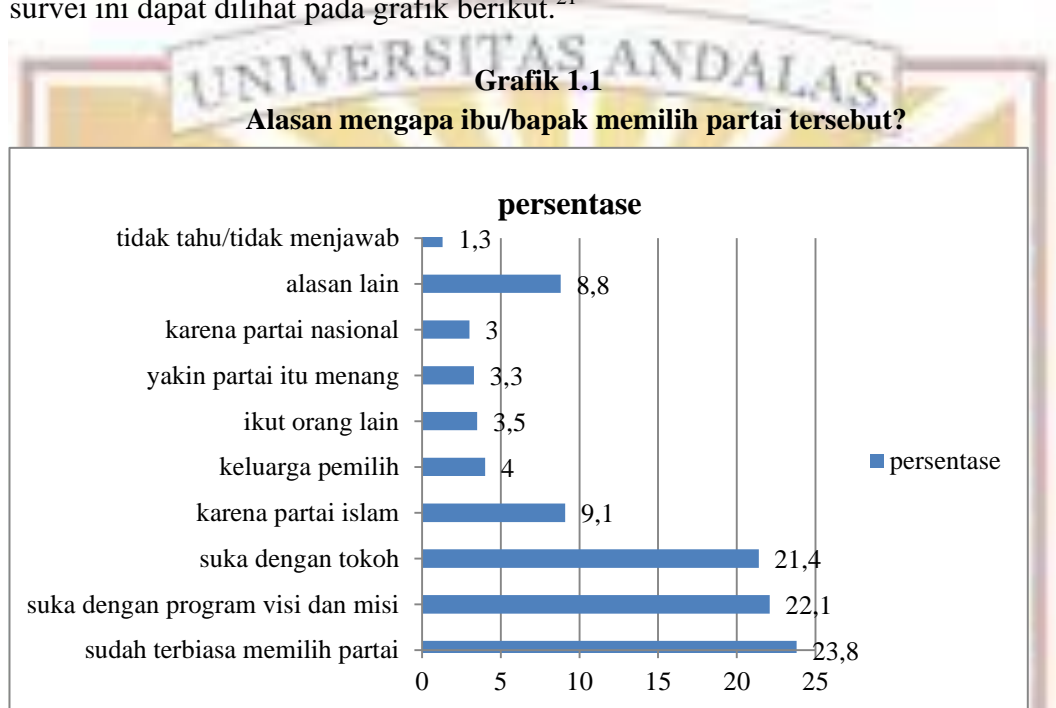
Berbeda dengan hasil survey yang dilakukan oleh LSI, berdasarkan hasil penelitian dari Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada pemilihan legislatif tahun 2004 menemukan kecendrungan pemilih menjatuhkan pilihan politik berdasarkan pendekatan sosiologis seperti aliran politik, pengaruh keluarga, teman, dan sebagainya. Berdasarkan pendekatan psikologis seperti kebiasaan memilih, ketokohan dan sebagainya. Maupun pendekatan rasional berdasarkan kebiasaan dan program partai politik.<sup>20</sup> Berdasarkan data dari hasil survei tersebut unsur psikologis adalah unsur yang paling dominan yang mendasari pemilih dalam menjatuhkan pilihan politiknya pada pemilu tahun 2004. Hal ini terlihat dengan mendominannya alasan seseorang memilih partai karena telah terbiasa untuk memilih partai sebesar 23,5%. Selain itu alasan ketokohan mendapatkan nilai 21,4% untuk pemilih menentukan pilihannya. Alasan psikologis lainnya adalah

---

<sup>19</sup> M Fachri Adnan, *“Perilaku Memilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”* (Padang, UNP Press Padang, 2012), hal. 19.

<sup>20</sup> Asep Ridwan. *“Memahami Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2004 di Indonesia, Jurnal Demokrasi dan HAM”* (Jakarta: The Habibie Center, 2000), hlm 43-44.

adanya keyakinan partai itu akan menang sebesar 3,3%. Dengan demikian jika ketiga alasan tersebut digabungkan maka sebesar 48,2% pemilih akan menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan alasan psikologis. Persentasi hasil survei ini dapat dilihat pada grafik berikut.<sup>21</sup>



sumber : lembaga survey Indonesia (LSI) tahun 2004

Alasan kedua yang memiliki kecenderungan terbesar adalah alasan rasional yang mendasari pemilih menjatuhkan pilihan politiknya yaitu sebesar 21,1% dengan alasan pemilih memilih partai berdasarkan kesukaan terhadap visi, misi, dan programnya. Sedangkan alasan sosiologis memiliki peringkat terendah yaitu hanya 19,6%, yang merupakan gabungan dari 9,1% dari pemilih memilih partai islam, 4% karena ikut keluarga, 3,5% karena orang lain dan 3% lainnya karena partai nasionalis.<sup>22</sup> Penelitian lain juga dilakukan oleh KPU Sumatera Barat pada pemilu 2019 untuk melihat pemetaan persepsi masyarakat Sumbar, hasil

<sup>21</sup> Asep Ridwan. "Memahami Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2004 di Indonesia, *Jurnal Demokrasi dan HAM*" (Jakarta: The Habibie Center, 2000), hlm 43-44.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal 44

penelitian ini menunjukkan bahwa pemilih dari semua kelompok usia dan jenjang pendidikan menjadikan visi, misi, dan program dari calon untuk menentukan pilihan terutama dalam kelompok usia muda dan jenjang pendidikan sarjana. Pada level pendidikan tertentu (tidak sekolah/ lulusan SD dan SMP) kesamaan agama sangat mempengaruhi alasan pemilih dalam menentukan pilihan.<sup>23</sup>

Penelitian lain yang pernah dilakukan menemukan hal baru dalam perilaku memilih, selain kecenderungan pemilih berdasarkan tiga pendekatan diatas juga ditemukan adanya kecenderungan perilaku memilih berdasarkan uang yang diterima, atau yang sering disebut dengan politik uang. Peneliti yang dilakukan oleh Philip Jacob pada masyarakat Etnis Timor Di Kota Kupang dalam pemilu 2014 lalu memberikan kesimpulan bahwa selain faktor kedaerahan, kedekatan dengan calon, visi misi calon, ada hal lain yang menarik yaitu ditemukan adanya hubungan kecenderungan perilaku memilih masyarakat dengan pemberian uang oleh partai politik maupun calon yang sedang bersaing.<sup>24</sup>

Sengitnya persaingan pada pemilu mengakibatkan calon harus melakukan berbagai cara untuk memperoleh perhatian dari masyarakat, mulai dari cara yang baik seperti kampanye terbuka hingga pembelian suara masyarakat melalui politik uang, seperti yang terjadi pada Pilkada tahun 2015. Edward Aspinall dan Mada Sukmajati dalam bukunya yang berjudul *politik uang di Indonesia : patronase dan klientalisme pada pemilu legislatif 2014* menyebutkan bahwa politik uang tidak hanya berbentuk distribusi uang tunai saja, tetapi juga dalam bentuk

---

<sup>23</sup> KPU Sumatera Barat, “*survei pasca pemilu 2019; Pemetaan Persepsi Atas Penyelenggaraan Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Sumatera Barat Padang 1 Desember 2019*”

<sup>24</sup> Annanias Riyoan Philip Jacob, “*Preferensi Masyarakat Etnis Timor Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Di Kota Kupang*” (Surabaya : Universitas Airlangga, FISIP, 2014) hal. 10.

pemberian benda-benda kelompok ataupun pribadi. Ada 5 variasi yang masuk dalam kategori politik uang, diantaranya (1) Pembelian suara (*vote buying*); (2) Pemberian barang pribadi (*individual gift*); (3) Pemberian barang-barang kelompok; (4) Pelayanan dan Aktivitas; (5) Proyek-Proyek gentong babi (*pork barrel project*).<sup>25</sup>

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menemukan banyak praktek politik uang pada Pilkada tahun 2015 lalu. Salah satunya adalah penelitian dari KPU Pemekasan (2015) tentang politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Data yang didapatkan saat menjelang pemilihan, warga mendapat imbalan uang kisaran Rp 30.000 untuk satu suara. Patokan nilai rupiah juga berbeda antara satu tempat dan tempat lain, ada yang kisaran Rp. 10.000 – Rp. 15.000, ada juga kisaran Rp. 25.000 - Rp. 50.000 untuk satu suara.<sup>26</sup> Praktik politik uang juga terjadi di Sumbar, pada Pilkada tahun 2015 Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Sumbar mengungkap bahwa 60 persen atau 12 dari 19 kabupaten kota di Sumbar rawan terhadap politik uang, meliputi 425 TPS yang pernah tersangkut laporan politik uang. Berdasarkan data dari Bawaslu daerah yang paling rawan itu adalah Kabupaten Dhamasraya, sebanyak 118 TPS dan Kabupaten Agam 82 TPS beserta 10 daerah lainnya sebagai berikut:<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (ed), *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientalisme di Pemilu Legislatif 2014* (Yogyakarta : Polgov, 2015), hlm. 24.

<sup>26</sup> Tim Riset KPU Kabupaten Pemekasan bekerjasama dengan Tufiq Hidayat, *Politik Uang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 di Kabupaten Pemekasan, Laporan Penelitian, 2015*

<sup>27</sup> Muslim AR, “*Jelang Pencoblosan Pilkada Sumbar Rawan Politik uang*”, (<https://www.liputan6.com/Pilkada/read/2381148/jelang-pencoblosan-Pilkada-di-Sumbar-rawan-politik-uang>) Diakses pada 2 oktober 2019.

**Tabel 1.4**  
**TPS Yang Pernah Tersangkut Laporan Politik Uang**

No	Kota/Kabupaten	Jumlah TPS
1.	Dharmasraya	118 TPS
2.	Agam	82 TPS
3.	Solok	70 TPS
4.	Pasaman	28 TPS
5.	Pesisir Selatan	27 TPS
6.	Bukittinggi	26 TPS
7.	Lima puluh kota	24 TPS
8.	Sijunjung	19 TPS
9.	Padang Pariaman	17 TPS
10.	Kepulauan Mentawai	8 TPS
11.	Padang	4 TPS
12.	Kota Solok	2 TPS
<b>Jumlah Total</b>		<b>425 TPS</b>

Sumber : *Liputan6.com*

Selain data diatas dalam Pilkada tahun 2015 di Sumbar juga terjadi beberapa kasus politik uang. Diantaranya berita yang didapat dari republika pada Kamis, 10 Desember 2015, menurut ketua Bawaslu Sumatera Barat, Elly Yanti, mengatakan ada empat daerah yang dilaporkan terindikasi politik uang, diantaranya Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Solok Selatan. Untuk Kota Solok, ditemukan beberapa masyarakat mendapatkan uang sebesar Rp.200.000 dari calon pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 17.00 dan pada pukul 01.00 dini hari.<sup>28</sup> Selanjutnya juga ditemukan praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan nomor urut satu, seperti informasi yang didapatkan dari media bahwa saat pemilihan Gubernur Sumatera Barat, politik uang terjadi di beberapa daerah pinggiran Kota Padang seperti di daerah Taruko, Pasie Nan Tigo, Sungai Sapiah, dan Kuranji. Masyarakat ditempat-tempat tersebut mendapatkan pembagian sembako, *magicom* dan uang tunai. Untuk paket sembakonya,

<sup>28</sup> Rumah Pemilu. “Empat Daerah Terindikasi Politik Uang di Sumbar” pada hari Sabtu 12 Desember 2015, dalam (<http://rumahpemilu.org>, diakses pada 10 Oktober 2019).

dimasukkan beras beserta kartu nama atau stiker paslon nomor urut 1 kedalam kantong plastik putih.<sup>29</sup>

Berdasarkan banyaknya praktik politik uang yang ditemukan menjelang pemilu tersebut, peneliti berasumsi bahwa politik uang akan berpengaruh pada perilaku memilih masyarakat. Hal ini juga dapat berakibat berubahnya pola pikir dan terbentuknya persepsi masyarakat dalam menentukan pilihan terhadap pemimpin. Berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi menjelang Pilkada seperti diatas menarik diteliti bagaimana persepsi dan pilihan politik masyarakat Sumbar pada Pilkada tahun 2020 ini. Pilkada serentak ini akan diikuti oleh 270 daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota.<sup>30</sup> Pada Pilkada Sumbar tahun 2020 ini beberapa partai politik telah menyiapkan sederetan nama calon untuk bertarung memperebutkan kursi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Nama calon yang mengagung memiliki latarbelakang yang cukup beragam, mulai dari pemerintah daerah yang pernah menjabat, akademisi, hingga POLRI/TNI. Berikut adalah nama bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ikut dalam Pilkada Sumbar tahun 2020.

---

<sup>29</sup> Berita Politik Uang Sumbar (<http://goSumbar.com>, diakses pada 10 Oktober 2019).

<sup>30</sup> Tim Detikcom, "Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020", (<https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>, diakses Pada 16 September 2019)

**Tabel 1.5**  
**Daftar Bakal Calon Gubernur Sumbar Sementara**  
**Periode 2020-2025**

No	Nama Calon	Rekam Jejak
1.	Mulyadi	Anggota DPR RI dari partai Demokrat
2.	Epyardi Asda, M.Mar	Mantan Anggota DPR-RI dari partai PPP
3.	M. Shadiq Pasadique, Ir.SH	Bupati tanah datar dua periode dari Partai Amanat Nasional
4.	Mahyeldi Ansharullah, H.SP	Walikota padang dua periode dari partai PKS
5.	Riza Falepi, H. ST. MT	Walikota Payakumbuh
6.	Fakhrizal,Irjen.Pol.Drs.H. M.Hum	Kapolda Sumatra Barat
7.	Nasrul Abit Drs. H	Wakil Gubernur Sumbar 2015-2020
8.	Ganefri, Prof. Drs. H.Ph.D	Rektor Universitas Negeri Padang
9.	Sutan Riska Tuangku Kerajaan, SE	Bupati Dhamasraya
10.	Alex Indra Lukman	Ketua partai PDI-P sumbar
11.	Adib Alfikri, SE, MSi	Kepala Dinas Pendidikan Sumatra Barat
12.	Ali Mukhni, Drs. H	Bupati Padang Pariaman
13.	Fadli Amran, BBA	Walikota Padang panjang dari partai
14.	Indra Catri, Dr.Ir.H	Bupati Kabupaten Agam
15.	Reydonnyzar Moenek, Dr. M Devt. M	Mantan PLT Gubernur Sumbar
16.	Zul Elfian DT.Tianso	Walikota Solok
17.	Syamsu Rahim Drs.H. M.M	Mantan Bupati Solok
18.	Fauzi Bahar, Dr, H, MSi	Mantan Walikota Padang
19.	Irdiansyah Tarmizi, Drs, H	Bupati Kabupaten Tanah Datar

Sumber : Tim Detikcom 2019

Sederet nama yang muncul inipun selain yang sudah memiliki partai politik untuk ditunggangi ada juga yang masih belum memiliki partai politik untuk maju pada pilkada Sumbar mendatang diantaranya adalah Ganefri (Rektor Universitas Negeri Padang), Indra Catri (Bupati Agam), Fakhrizal (Kapolda Sumbar). Dari sejumlah nama yang mengapung terlihat dari rekam jejak mereka yang pernah menjabat sebagai pemimpin di daerah masing-masing maupun memimpin di level nasional (anggota DPR-RI).<sup>31</sup> Setelah terjadinya proses pendaftaran seleksi calon untuk maju pada pilkada, maka KPU mengumumkan 4 pasang bakal calon

<sup>31</sup>Isa Kurniawan, “Menakar Balongub Sumbar 2020-2025”, (<https://mimbarsumbar.id/2019/06/08/menakar-balongub-sumbar-2020-2025/>), diakses pada 30 Juli 2019)

Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dan maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Sumbar 2020. Berikut adalah daftar 4 pasang calon yang maju.

**Tabel 1.6**  
**Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur**  
**Sumatera Barat Pilkada Tahun 2020**

No	Nama Calon	Partai Pengusung
1.	Mulyadi – Ali Mukhni	1. Partai Demokrat 10 Kursi di DPRD 2. Partai Amanat Nasional (PAN) 10 Kursi di DPRD
2.	Nasrul Abit – Indra Catri	1. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 14 kursi di DPRD
3.	Fakhrizal – Genius Umar	1. Partai Golongan Karya (Golkar) 8 Kursi di DPRD 2. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 3 Kursi di DPRD 3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3 Kursi di DPRD
4.	Mahyeldi – Audy Joinaldi	1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 10 Kursi di DPRD 2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4 Kursi di DPRD

Sumber : Tim Detikcom 2019

Melihat dari sejumlah nama diatas yang dicalonkan untuk maju pada Pilkada 2020 maka peneliti beranggapan bahwa figur dan rekam jejak para calon menjadi faktor yang paling ditekankan pada Pilkada 2020 nanti. Hal ini menunjukkan bahwa popularitas dan profil kandidat kembali menjadi faktor determinan dalam Pilkada langsung mendatang. Disisi lain maraknya politik uang yang terjadi pada pemilu 2014 maupun Pilkada 2015 lalu diberbagai daerah juga adanya evaluasi terhadap pemilu pada tahun-tahun sebelumnya maka peneliti beranggapan bahwa sangat memungkinkan jika faktor politik uang juga memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan persepsi politik masyarakat yang nanti akan terwujud berupa tindakan dalam perilaku memilih masyarakat Sumbar



khususnya Kota Padang. Hal inilah yang akan menjadi hipotesis awal peneliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hipotesis tersebut pada Pilkada Sumbar tahun ini akan terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi persepsi masyarakat kota Padang. Diantaranya yang memiliki kemungkinan identifikasi calon kandidat atau figur, masih menjadi faktor utama perilaku pemilih masyarakat atau masyarakat menjatuhkan pilihan berdasarkan identifikasi kepartaian atau pilihan masyarakat dipengaruhi oleh program yang akan ditawarkan calon nanti, ataukah pilihan masyarakat akan dipengaruhi oleh media massa dalam berkampanye nanti dan tidak menutup kemungkinan masyarakat menjatuhkan pilihan kepada calon berdasarkan kedekatan hubungan kekerabatan, maupun nanti berdasarkan faktor politik uang. Untuk menjawab semua kemungkinan itu diperlukan adanya penelitian yang lebih mendalam untuk melihat persepsi masyarakat Kota Padang dalam menentukan pilihan politiknya pada Pilkada tahun 2020 nanti.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pilkada serentak yang semula dijadwalkan 23 September 2020, terpaksa ditunda menjadi 9 Desember 2020 akibat pandemi virus *corona* yang menyerang hampir keseluruhan wilayah Indonesia. Penundaan Pilkada ini dilakukan sebagai solusi pemutus mata rantai virus *corona*. Penundaan ini dilakukan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2020 yang mengatur tentang Pilkada, Perpu ini mengatur tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2005 tentang perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang. Berdasarkan salinan dari Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara, Perpu ini dibuat karena pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia dan telah menelan banyak korban. Adapun isi Perpu yang ditetapkan 4 Mei 2020 ini bagian yang menyatakan penundaan dan penjadwalan ulang pelaksanaan Pilkada terdapat dalam pasal 201A, yang berbunyi:<sup>32</sup>

1. Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).
2. Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.
3. Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat {21 tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A}.

Pilkada yang dilaksanakan bulan Desember 2020 tersebut di Sumbar akan diikuti oleh 4 pasang calon yang telah diumumkan secara resmi oleh KPU Sumbar dengan berbagai latar belakang. Pasangan calon Gubernur dengan nomor urut 1 adalah Mulyadi-Ali Mukhni, pasangan ini di usung oleh partai Demokrat dan PAN yang sama-sama mendapatkan 10 Kursi di DPRD Sumbar, awalnya pasangan ini juga mendapatkan dukungan dari PDI-P yang diumumkan langsung oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. Hanya saja, karena pernyataan Puan yang menyebut "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," hingga pernyataan ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat Sumbar membuat paslon ini tidak mengambil dukungan PDI-P.

---

<sup>32</sup> Egi adyatama, Amirullah : 5 Mei 2020, "Jokowi Teken Perpu Penundaan Pilkada, Begini Isinya" (<https://nasional.tempo.co/read/1339089/jokowi-teken-perpu-penundaan-pilkada-begini-isinya/full&view=ok>, Diakses 15 Oktober 2020)

Melihat dari rekam jejaknya Mulyadi adalah anggota DPR-RI asal Sumbar tiga periode hingga saat ini. Selain itu ia juga merupakan kader Demokrat yang saat ini juga sebagai Ketua DPD Demokrat Sumbar. Sedangkan, Ali Mukhni adalah birokrat senior yang menjabat sebagai Bupati Padang Pariaman dua periode. Sebelumnya, dia juga Wakil Bupati Padang Pariaman. Ali Mukhni merupakan kader PAN yang merupakan mantan Ketua DPW PAN Sumbar sebelum diambil alih oleh Indra Dt Rajolelo pada periode 2020 ini.<sup>33</sup>

Pasangan nomor urut 2 adalah Nasrul Abit - Indra Catri yang diusung oleh satu partai saja yaitu Gerindra. Gerindra sebagai partai pemenang di Pemilihan Legislatif 2019 lalu memiliki 14 kursi dan bisa mengusung sendiri untuk paslon Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal itu dibuktikan Gerindra dengan mengusung Nasrul Abit-Indra Catri tanpa ada koalisi dengan partai lain. Nasrul Abit saat ini merupakan Ketua Dewan Pembina Gerindra Sumbar. Sebelumnya, dia sebagai Ketua DPD Gerindra dan digantikan oleh Andre Rosiade. Nasrul Abit adalah birokrat senior yang meniti karir mulai dari Wakil Bupati Pesisir Selatan dua periode, Bupati Pesisir Selatan dua periode dan saat ini sebagai Wakil Gubernur Sumbar. Sementara itu, calon wakilnya, Indra Catri, juga seorang birokrat yang pernah bertugas sebagai kepala dinas di Kota Padang. Kemudian menjabat sebagai Bupati Agam dua periode hingga saat ini.

Pasangan nomor urut 3 adalah Fakhrizal - Genius Umar, pasangan ini diusung oleh koalisi tiga partai yaitu Golkar, Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Koalisi ini memiliki 14 kursi di DPRD Sumbar, yaitu 8 kursi dari

---

<sup>33</sup> Perdana Putra, Abba Gabrilin, "Profil 4 Paslon di Pilgub Sumbar Ada Anggota DPR Hingga Jendral" (<https://regional.kompas.com/read/2020/09/07/11062361/ini-profil-4-paslon-di-pilgub-sumbar-ada-anggota-dpr-hingga-jenderal?page=all>), Diakses pada 15 Oktober 2020, 14:38)

Golkar, 3 kursi dari Nasdem, dan 3 kursi dari PKB. Fakhrizal merupakan jenderal polisi bintang dua yang saat ini bertugas di Markas Besar (Mabes) Polri. Sebelumnya, Fakhrizal merupakan Kapolda Sumbar yang sudah banyak bersentuhan dengan masyarakat Sumbar. Keinginan Fakhrizal untuk membangun Sumbar sangat kuat, kendati dia harus pensiun dini dari kepolisian. Sementara itu, Genius Umar adalah seorang birokrat yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Pariaman. Sebelumnya, Genius adalah Wakil Wali Kota Pariaman.<sup>34</sup>

Calon Gubernur terakhir nomor urut 4 adalah Mahyeldi dan Audy Joinaldi, pasangan ini merupakan paslon pertama yang mendaftar ke KPU Sumbar, diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan kekuatan 14 kursi di DPRD Sumbar. Mereka telah memenuhi persyaratan minimal 13 kursi di DPRD, yakni PKS dengan 10 kursi dan PPP dengan 4 kursi. Mahyeldi merupakan politisi PKS yang sudah menjabat dua periode sebagai Wali Kota Padang. Saat ini, Mahyeldi masih aktif sebagai Wali Kota. Sementara Audy Joinaldy adalah kader PPP yang merupakan seorang pengusaha sukses di rantau dan ingin mengabdikan di kampung halamannya.<sup>35</sup>

Pilkada kali ini lebih menarik karena Gubernur yang sedang menjabat saat ini Irwan Prayitno politisi asal PKS tidak lagi ikut bertarung, dikarenakan beliau telah menjabat sebagai Gubernur selama dua periode berturut. Meskipun demikian melihat sederet nama calon Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan rekam jejaknya, peneliti berasumsi bahwa rekam jejak dari calon menjadi salah satu faktor yang ditonjolkan dalam pilkada tahun ini. Hal ini menarik diteliti jika

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Perdana putra

<sup>35</sup> *Ibid.*, Perdana putra

dilihat dari persepsi politik masyarakat terhadap calon menjelang pilkada yang akan diwujudkan melalui perilaku memilih nantinya. Dalam konsep persepsi politik masyarakat, persepsi dibentuk dari komponen kognitif atau pengetahuan masyarakat tentang hal yang diamatinya, dalam hal penelitian ini adalah fenomena politik sebelum terjadinya pemilu, yang bisa saja mereka dasarkan pada pengetahuan maupun pengalaman pribadi individu yang akan diinterpretasikan dalam sebuah perilaku politik.<sup>36</sup>

Dalam konsep tersebut yang mempengaruhi persepsi politik masyarakat salah satunya adalah faktor sosial demografi dimana dalam faktor tersebut terdapat keadaan sosial, gender, pendidikan dan pekerjaan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi yang dianut masing-masing individu berbeda-beda hal ini karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain persepsi, lingkungan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku politik seseorang. Berdasarkan teori perilaku pemilih ini dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional (*rational choice*). Selain dengan tiga pendekatan tersebut perilaku memilih masyarakat yang berkembang saat ini juga bisa di lihat dengan pendekatan politik uang. Penjelasan teoritis tentang perilaku memilih ini didasarkan pada beberapa model atau pendekatan yaitu,

*Pertama* model sosiologis atau yang juga dikenal dengan mazhab Columbia (*the Columbia school of electoral behavioral*). Para penganut model sosiologis

---

<sup>36</sup> Musty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta; Rineka Cipta,1990, Hal.23. *Skripsi*, Dwi Indra Kurniawan “Perbandingan Persepsi Politik Masyarakat Kabupaten Indramayu Dan Kabupaten Karawang Terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Perempuan Masa Bakti 2015-2020” Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas 2018.Hlm.22.

yakin bahwa seseorang memilih partai atau calon tertentu karena adanya kesamaan antara karakteristik sosiologis pemilih dengan karakteristik partai atau calon.<sup>37</sup> *Kedua*, pendekatan psikologis. mazhab ini lebih mendasarkan pada suatu keadaan psikologis, yaitu perasaan dekat dengan sikap mendukung atau setia pada, atau mengidentifikasi diri dengan partai politik tertentu.<sup>38</sup>

*Ketiga*, pendekatan pilihan rasional (*rational choice*), menurut pendekatan seorang warga dianggap telah rasional dan paham dengan politik. pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku memilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadopsi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik). apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka dalam perilaku memilihpun masyarakat akan dapat bertindak rasional, yaitu memberikan suara pada partai atau calon legislatif yang dianggap dapat menekan kerugian sekecil-kecilnya dan juga memilih alternatif yang akan menimbulkan resiko paling kecil.<sup>39</sup>

*Terakhir* adalah pendekatan politik uang, Politik uang dalam artian sempit dapat dipahami sebagai distribusi uang (pemberian uang tunai ataupun barang) pada saat pemilihan umum oleh kandidat kepada pemilih. Edward Aspinall dalam bukunya yang berjudul *politik uang di Indonesia : patronase dan klientalisme pada pemilu legislatif 2014* menyebutkan bahwa politik uang tidak hanya berbentuk distribusi uang tunai saja, tetapi juga dalam bentuk pemberian benda-

---

<sup>37</sup> David Marsh Dan Gerry Stoker, "*Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*", (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2011) Hal. 54

<sup>38</sup> M Fachri Adnan, "*Perilaku Memilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*" (Padang, UNP Press Padang, 2012), hal.41.

<sup>39</sup> David Marsh, *op.cit.*, hal 76.

benda kelompok ataupun pribadi. Ada 5 variasi yang masuk dalam kategori politik uang, diantaranya (1) Pembelian suara (*vote buying*); (2) Pemberian barang pribadi (*individual gift*); (3) Pemberian barang-barang kelompok; (4) Pelayanan dan Aktivitas; (5) Proyek-Proyek gentong babi (*pork barrel project*).<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas untuk mengetahui persepsi yang terbentuk dalam masyarakat juga perilaku memilih masyarakat berdasarkan faktor yang mempengaruhi maka rumusan masalah penelitian ini adalah **Bagaimana Pengaruh Persepsi Politik Terhadap Pilihan Politik Masyarakat Kota Padang Menjelang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan secara umum penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa pengaruh persepsi politik terhadap pilihan politik masyarakat Kota Padang menjelang pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

#### **a. Secara Akademis**

Hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan konsep ilmu politik terkait konsep persepsi politik masyarakat dalam Pilkada di Kota Padang

---

<sup>40</sup>Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (ed), *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientalisme di Pemilu Legislatif 2014* (Yogyakarta : Polgov, 2015), hlm. 24.

maupun didaerah lain yang sama, serta dapat sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi nantinya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat dan pemerintah yang sedang menjabat maupun yang ingin mencalonkan diri serta dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat pada saat pembuatan maupun penerapan kebijakan. melalui pendekatan perilaku memilih pemerintah seharusnya sudah mengetahui faktor dominan alasan masyarakat memilih mereka hal ini nanti juga akan menjadi pertimbangan oleh pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan, serta dapat membentuk kesadaran sikap masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.





